



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MORA SONANG MARPAUNG
NIK : 3174040411890007
Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Sub Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
Jabatan : ANGGOTA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 10 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : BANANI BAHRUL
NIK : 3671020408800008
Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Sub Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
Jabatan : ANGGOTA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 27 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YUDHISTIRA PRASASTA
NIK : 3671051007900005
Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Sub Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
Jabatan : ANGGOTA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 24 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BANANI BAHRUL**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **983758**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.900.105.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.105.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	196.700.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.700.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	450.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.111.255.000
III. HUTANG	Rp.	1.494.435.151
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	616.819.849

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHISTIRA PRASASTA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 983782

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/65 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA PCX 160 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	44.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	774.000.000
III. HUTANG	Rp.	201.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	573.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MORA SONANG MARPAUNG**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **1024946**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.000.000
1. LAINNYA, IPHONE HANDPHONE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.777.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.777.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Sl. No.	Nama PN / WL	Tanggal Laporan	Jenis Pelaporan	Jabatan	Status Laporan	Laporan Via	Aksi
1	QORI AYATULLAH	31/12/2025	Periodik	• KETUA (K ₄)	Proses Verifikasi Surat Kuasa: Sudah Diterima	Online	

Yth. Sdr QORI AYATULLAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi

Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	: QORI AYATULLAH
Jabatan	: KETUA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Yth. Sdr **RUSTANA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: RUSTANA
Jabatan	: ANGGOTA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**